

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tahun ini lebih tepatnya tahun 2023 semua kalangan dari muda hingga tua orang menggunakan sistem salah satu sistem yang digunakan adalah sistem informasi tanpa kita sadari di setiap hari nya di laptop, hp dan lain lain nya kita telah mengakses sistem informasi. Sistem informasi bukan hanya digunakan di perusahaan perusahaan besar saja sistem informasi digunakan juga di instansi pemerintahan. Keuntungan sistem informasi di instansi pemerintahan salah satunya adalah orang lain bisa mengakses sistem tersebut di manapun dan kapan pun, itu adalah suatu keunggulan dari teknologi yang telah maju sekarang. Banyak sekali instansi pemerintahan yang telah membuat sistem informasi dari sistem informasi berbasis aplikasi maupun web ini dikarenakan untuk memudahkan pelayanan di instansi pemerintahan tersebut dan memudahkan pengguna untuk bisa mengakses sistem tersebut. Instansi pemerintahan yang menggunakan sistem informasi salah satu contoh nya adalah KEMENKUMHAM (Kementerian Hukum dan Ham) sistem informasi kemenkumham ini memberikan semua yang dibutuhkan oleh penggunanya. Sistem informasi tidak hanya boleh di buat oleh pemerintah pusat saja semua instansi pemerintahan boleh membuat sistem informasi untuk memudahkan pelayanan di instansi tersebut.[1]

BPKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah) adalah salah satu instansi pemerintahan daerah Provinsi Jambi yang mengelola keuangan pendapatan daerah di mana pendapatan daerah ini berasal dari berbagai sumber

antara lain adalah pendapat dari air permukaan yang dimaksud air permukaan adalah pemakaian sungai atau laut yang digunakan untuk kegiatan perusahaan maka perusahaan tersebut harus membayar sesuai dari pemakaian air tersebut lalu bayaran dan uang tersebut dimasukkan ke kas daerah selanjutnya pendapatan lain dari BPKPD adalah BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) ini adalah pajak dari hak milik kendaraan bermotor dari satu orang ke orang lain seperti jual beli motor bekas. Itulah adalah beberapa contoh dari pendapatan instansi pemerintahan daerah BPKPD . [2]

Pembagian hasil adalah sistem yang dilakukan perjanjian atau ikatan yang dilakukan bersama antara dua pihak di dalam kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut adanya perjanjian pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua pihak. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pembagian dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam terdiri dari dua sistem yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing* [3]

Provinsi Jambi memiliki beberapa Kabupaten dan Kota di antara nya adalah Kabupaten Batanghari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo dan meliputi Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, lalu pendapatan itu meliputi dari beberapa pajak yaitu pajak PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Pajak Rokok dan Air Permukaan . Karena pembagian laporan Pendapatan pajak tersebut akan

dibagikan ke setiap daerah sesuai dengan besarnya wilayah jumlah penduduk dan faktor lainnya akan merepotkan untuk membagi satu-satu kepada BPKPD daerah lainnya dan lalu pajak tersebut akan disahkan oleh gubernur Jambi yang akan memberikan surat PERGUB (Perintah Gubernur) dengan membagikan hasil pajak tersebut ke setiap daerah. Pajak tersebut akan dialokasikan dari BPKPD provinsi Jambi ke Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi lalu dana tersebut harus di data setiap triwulan berapa dana yang telah dikeluarkan daerah tersebut karena dana tersebut harus di *update* setiap triwulan maka akan sangat merepotkan jika dana tersebut hilang atau di edit orang tanpa tanggung jawab, lalu dana yang telah dibagikan akan di cairkan daerah dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari permasalahan yang ada maka dibutuhkan peran untuk membagikan surat pembagian laporan dana secara merata dan membutuhkan sistem informasi yang akan membantu melihat dana alokasi dan realisasi yang bisa mengedit hanya satu admin di BPKPD setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi untuk menghindari edit data di dana Kabupaten tersebut maka dibutuhkan sistem informasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan mengambil judul yaitu :

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS WEB PADA BPKPD PROVINSI JAMBI

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Merancang Sistem

Informasi Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi”

1.3 BATASAN MASALAH

Adapun batasan masalah yang mendasari penelitian agar tidak menyimpang dari yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi laporan realisasi anggaran yang dibangun berbasis web.
2. Perancangan sistem informasi ini dapat memberikan pengguna untuk menginput data, mengedit data dan menampilkan hasil pendapatan yang akan di bagikan ke Kabupaten di Provinsi Jambi.
3. Perancangan sistem informasi web menggunakan bahasa pemrograman *REACT NATIVE*

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Merancang sistem informasi laporan realisasi anggaran untuk pembagian hasil dana di BPKPD Provinsi Jambi ke BPKPD Kabupaten.
2. Mengimplementasikan sistem informasi laporan realisasi anggaran untuk pembagian hasil pajak daerah ke Kabupaten di Provinsi Jambi

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara nya adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi ini mempercepat info dari BPKPD Provinsi Jambi untuk pembagian hasil pendapatan ke BPKPD Kabupaten.
2. Memberikan kemudahan kepada petugas dalam mengelola informasi laporan realisasi anggaran yang tersimpan di *database* dan diakses melalui *browsers*
3. Memberikan peningkatan kualitas instansi Badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah Provinsi Jambi
4. Admin dapat melakukan menginput beberapa data dan memberikan informasi ke instansi lainnya
5. User dapat melakukan menginput data LKT (Lembar Konfirmasi Transfer) untuk instansi yang ingin di cairkan dana dan memberikan bukti ke BPKPD pusat

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistem penulisan ini penulis menggambarkan secara umum mengenai apa saja yang akan dibahas dalam setiap bab dari laporan ini. Laporan ini merupakan perancangan web dimana sistematika penulisan ini terdiri dari enam (6) bab meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis membahas tentang latar belakang penelitian ,rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematik penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan menunjang penulisan dan penelitian untuk memberikan sekilas gambaran tentang beberapa gambaran mengenai topik masalah yang akan dibahas perancangan sistem informasi ini untuk pengenalan , use case diagram activity diagram dan lain lain

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tahapan proses menjelaskan bagaimana pelaksanaan penelitian berlangsung. Yang mencakup pengumpulan data selama mengerjakan penelitian dan teknik pengembangan sistem yang akan dibangun

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas tentang perancangan sistem informasi pembagian hasil yang akan berjalan yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan class diagram

BAB V : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini menguraikan tentang proses perancangan dan pembahasan penunjang keputusan sebagai keputusan penggunaan sistem informasi serta pengujian yang dibuat.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan pembahasan dari keseluruhan bab-bab sebelumnya saran yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan website ini